

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Moral Sensitivity Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa

Bernad J.M. Situmeang¹, Renova Simanjuntak², Tantry Sitohang Andi Lolo³

^{1,2,3}Universitas Ottow Geissler Papua, Indonesia

Email: jayapuracity48@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini ingin menguji apakah kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan moral sensitivity yang disebut sebagai variabel independen berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa yang disebut sebagai variabel dependen. Metode penelitian ini bersifat kuantitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat eksplorasi, deskriptif, eksplanasi dan prediksi. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penyebaran kuesioner terhadap perangkat desa. Adapun jenis data penelitian yang digunakan adalah data primer dan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 21. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa dan moral sensitivity berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa, sedangkan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci: *Pencegahan Fraud, Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Moral Sensitivity.*

Abstract

This study wants to test whether the competence of village apparatus, internal control systems and moral sensitivity which are referred to as independent variables influence the prevention of fraud in village financial management which are referred to as the dependent variable. This research method is quantitative which aims to answer research questions that are exploratory, descriptive, explanatory and predictive in nature. The data collection method used in this study was by distributing questionnaires to village officials. The type of research data used is primary data and data processing is carried out using the SPSS 21 application. The test results show that village apparatus competence and moral sensitivity have an effect on fraud prevention in village financial management, while the internal control system has no effect on fraud prevention in village financial management.

Keywords: *Fraud Prevention, Village Apparatus Competence, Internal Control System and Moral Sensitivity.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir (www.bpkp.go.id). Pemerintah memberikan kesempatan yang besar bagi desa untuk mengelola keuangan desa berupa kekayaan baik yang bersumber dari APBN (Dana Desa) maupun Pendapatan Asli Daerah, Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD), Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota, Hibah dan Pendapatan lainnya. Terkait dengan dana yang bersumber

dari APBN, Pemerintah terus meningkatkan alokasi dana ke seluruh desa di wilayah Indonesia. Pada tahun 2015 Dana Desa yang dialokasikan sebesar Rp. 20.766 triliun dan terus meningkat hingga tahun 2021 mencapai angka Rp. 71,871 triliun (www.kemenkopmk.go.id). Besarnya dana dan peran yang diterima desa ini memerlukan SDM yang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas dalam pengelolaannya. Namun saat ini SDM yang ada di desa masih lemah dalam pengelolaan keuangan desa sehingga hal ini bisa menyebabkan penyimpangan atau kecurangan (Islamiyah et al., 2020).

Kecurangan (fraud) merupakan fenomena yang masih terjadi di luar maupun di dalam negeri. Madoff Investment Securities LLC, Lehman Brothers, Cendant adalah beberapa skandal kecurangan yang sangat merugikan para investor yang terjadi di luar negeri. Di Indonesia juga banyak terjadi kasus-kasus kecurangan seperti kasus penggelapan nasabah Citibank oleh Malinda Dee, kasus laporan keuangan Bank Lippo, kasus kredit dengan dokumen dan jaminan fiktif BII dan lain-lain. Selain di sektor swasta di sektor pemerintahan juga banyak terjadi kecurangan atau korupsi (<https://www.liputan6.com/news/read/49949/bi>). Hasil SFI (Survei Fraud Indonesia) yang diterbitkan ACFE Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2019 fraud pada sektor pemerintahan menduduki peringkat kedua setelah industri keuangan dan perbankan. Beberapa contoh kasus adalah kasus korupsi penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Bupati Kotawaringin Timur, kasus E-KTP dan kasus suap pengadaan kebutuhan barang dan peralatan di Krakatau Steel (<https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia>). Tindakan korupsi ini tidak hanya terjadi di pemerintah pusat saja tetapi juga di daerah-daerah termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), kasus korupsi anggaran desa sepanjang tahun 2016-2020 sebanyak 676 kasus yang melibatkan 310 kepala desa dengan total kerugian negara sebesar Rp. 115 milyar. Beberapa contoh kasus penyalahgunaan anggaran desa adalah kasus Kepala Desa Pudar, Serang, Jaed Muklis didakwa melakukan korupsi dana desa sebesar Rp 531 juta, kasus penyelewengan Dana Desa oleh Pranajaya, Kepala Desa Dukuhmojo, Jombang. Kasus-kasus korupsi anggaran desa ini meliputi penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggelembungan anggaran, dan suap (<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/>).

Dampak fraud pada lembaga pada segi keuangan maupun nama baik lembaga sangat besar oleh sebab itu perlu dilakukan tindakan pencegahan fraud. Salah satu faktor yang terkait dengan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa adalah kompetensi aparatur desa dimana penyebab terjadinya fraud adalah kurangnya moral yang dimiliki setiap individu. Spencer dan Spencer (2008) dalam (Njonjie et al., 2019) menyatakan bahwa kompetensi merupakan landasan dasar karakteristik seseorang dan mengindikasikan cara berperilaku, berpikir, menyamakan situasi, dan mendukung untuk periode waktu yang lama. Hasil penelitian Njonjie menunjukkan bahwa semakin kompeten aparat pengelola keuangan desa, maka semakin berkurang kecurangan laporan keuangan dalam pengelolaan keuangan desa artinya kompetensi aparat dapat mencegah kecurangan pengelolaan keuangan desa. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Atmadja & Saputra, 2017) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal dengan moralitas sebagai variabel moderasi mempengaruhi pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan desa.

Pencegahan fraud dalam suatu lembaga juga dapat dilakukan dengan memperhatikan sistem pengendalian internal. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 mendefinisikan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketika sistem pengendalian internal suatu lembaga buruk maka akan mendorong seseorang melakukan penyimpangan.

Penelitian Syarif (2017) memberikan hasil bahwa semakin diterapkannya pengendalian internal dengan baik di SKPD maka tindakan kecurangan akan dapat berkurang. Begitu juga dengan penelitian Anshori (2017), Indriastuti (2017) yang menyatakan semakin efektif sistem pengendalian internal suatu organisasi

maka semakin rendah tingkat terjadinya kecurangan akuntansi. Namun penelitian-penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Dewi (2019) yang melakukan penelitian pada 75 pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali dengan hasil bahwa ada tidaknya pengendalian internal tidak menjamin menurunnya kecenderungan kecurangan artinya pengendalian internal tidak berpengaruh pada pencegahan fraud.

Faktor lain yang juga dapat dikaitkan dengan pencegahan kecurangan adalah moralitas. Moralitas merupakan tindakan atau perilaku baik/buruk yang bersumber dari dalam diri manusia yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan organisasi (Islamiyah et al., 2020). Penelitian (Islamiyah et al., 2020) mengungkapkan bahwa moralitas berpengaruh positif pada pencegahan fraud. Ketika level penalaran moral seseorang semakin tinggi maka akan semakin tinggi tingkat pula kebenaran yang dilakukan oleh orang tersebut sehingga dapat dikatakan tingkat penalaran moral yang tinggi dapat mencegah terjadinya kecurangan. (Islamiyah et al., 2020) juga menunjukkan hasil penelitian yang sama. Penelitian-penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Ade (2017) dalam (Damayanti, 2016) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi moral yang dimiliki seseorang belum tentu dapat mengurangi kecurangan akuntansi. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat dan pendamping desa kondisi di Kabupaten Sarmi setelah pembagian dana desa, kepala kampung meninggalkan tempat. Kepala Kampung pergi kota, ini menunjukkan perilaku yang mencerminkan kearah kecurangan, Adapun nilai dana desa di Kabupaten Sarmi untuk Tahun 2020 kisaran 800 juta untuk masing masing kampung. Total Kampung di Kabupaten Sarmi sebanyak 92 Kampung. Informasi yang diperoleh juga dari BPKAD adalah LPJ atas penyaluran dan penggunaan dana kampung yang suka terlambat dan kadang membuat laporan fiktif. Hal ini menjadi dasar untuk mengkaji lebih dalam berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa di beberapa kampung yang dapat dijangkau oleh peneliti. Dimana selama ini pejabat desa yang lain dan masyarakat juga tidak bisa melaporkan tindak kecurangan yang terjadi karena adanya rasa takut dan rasa tidak enak hati.

Dengan melihat gambaran fenomena fraud sebelumnya dan adanya inkonsistensi hasil penelitian-penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut tentang faktor-faktor yang terkait dengan pencegahan kecurangan dalam konteks pengelolaan keuangan desa yaitu kompetensi aparatur, Sistem Pengendalian Internal dan moralitas aparat. Penelitian ini mengacu terhadap penelitian (Islamiyah et al., 2020) yang berjudul pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan sensitivitas moral terhadap pencegahan fraud. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menguji secara empiris pengaruh Kompetensi aparatur terhadap pencegahan fraud,, untuk menguji secara empiris pengaruh SPI terhadap pencegahan fraud dan untuk menguji secara empiris pengaruh sensitivitas moral terhadap pencegahan fraud.

METODE

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan tujuan untuk memahami variabel-variabel yang diteliti. Lokasi penelitian akan dilakukan di tiga distrik yaitu Verkamp, Pantai Barat, dan Sungai Biri yang terletak di Kabupaten Sarmi. Populasi penelitian adalah perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa di 16 desa yang ada di distrik tersebut. Sebanyak 48 responden dipilih dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling.

Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang diperoleh melalui survei kuesioner yang diambil dari penelitian sebelumnya. Kuesioner akan diberikan kepada perangkat desa yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan keuangan desa. Terdapat empat variabel yang diteliti yaitu pencegahan fraud, kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian intern, dan sensitivitas moral. Definisi operasional dan pengukuran variabel dijelaskan dengan rinci, termasuk indikator untuk masing-masing variabel seperti fraud tree, latar belakang pendidikan, pelatihan, dan pengalaman aparatur desa, kerangka Levers of Control, serta sensitivitas moral. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai variabel-variabel yang diteliti.

RESULT AND DISCUSSION

Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penyebaran kuesioner kepada responden yaitu kepala desa/kampung, sekretaris desa/kampung dan bendahara desa/kampung dengan mendatangi langsung lokasi pengambilan sampel yaitu desa atau kampung – kampung yang berada pada distrik Veerkamp, distrik Pantai Barat Dan Distrik Sungai Biri sebanyak 16 kampung terletak pada Kabupaten Sarmi. Proses pendistribusian Kuesioner dilakukan kurang lebih 2 minggu yaitu dari tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 26 Juli 2021. Jumlah kuesioner yang dibagi sebanyak 48 Kuesioner dan yang dapat digunakan sebanyak 36 kuesioner.

Uji Instrumen Data

Tabel 1 Uji Validitas Kuesioner Variabel Penelitian

Butir	Nilai Correlation	Sig	Kriteria
KAD1	0,377	0,044	Valid
KAD2	0,515	0,001	Valid
KAD3	0,821	0,000	Valid
KAD4	0,495	0,002	Valid
KAD5	0,821	0,000	Valid
SPI 1	0,348	0,038	Valid
SPI2	0,468	0,004	Valid
SPI3	0,481	0,003	Valid
SPI4	0,510	0,001	Valid
SPI5	0,567	0,000	Valid
SPI6	0,591	0,000	Valid
SPI7	0,782	0,000	Valid
SPI8	0,602	0,000	Valid
SPI9	0,821	0,000	Valid
SM1	0,433	0,008	Valid
SM2	0,812	0,000	Valid
SM3	0,927	0,000	Valid
SM4	0,761	0,000	Valid
SM5	0,927	0,000	Valid
SM6	0,783	0,000	Valid
PF1	0,526	0,001	Valid
PF2	0,742	0,000	Valid
PF3	0,887	0,000	Valid
PF4	0,949	0,000	Valid
PF5	0,949	0,000	Valid
PF6	0,949	0,000	Valid
PF7	0,526	0,001	Valid
PF8	0,687	0,000	Valid
PF9	0,742	0,000	Valid

PF10	0,887	0,000	Valid
PF11	0,949	0,000	Valid

Sumber : Data Primer diolah, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan variabel kemampuan aparatur desa, sistem pengendalian internal, sensitivitas moral dan pencegahan fraud memiliki status valid dimana nilai hitunganya (*Corrected Item – Total Correlation*) > dari nilai r tabel sebesar 0,329

Uji Reliabilitas Kuesioner Variabel

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel	R alpha	R kritis	Kriteria
Kompetensi Aparatur Desa	0,620	0,600	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern	0,743	0,600	Reliabel
Sensitivitas Moral	0,767	0,600	Reliabel
Pencegahan Fraud	0,949	0,600	Reliabel

Sumber : Data Primer diolah, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan variabel kemampuan aparatur desa, sistem pengendalian internal, sensitivitas moral dan pencegahan fraud memiliki status reliabel dimana nilai hitunganya r alpha > dari nilai r kritis sebesar 0,600.

Uji Kualitas Data Penelitian

a. Uji Normalitas

Untuk menguji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Kriteria pengujian yang digunakan adalah nilai signifikansi, apabila nilai sig > 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal.

Tabel 3 Uji Normalitas Data

Model	Kolmogorov S	Asymp Sig	Keterangan
Unstandardized Residual	0,599	0,866	Normal

Sumber : Data Primer diolah, 2021

b. Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam regresi dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya, (2) jika nilai tolerance value > 0,10 dan VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4 Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
KAD	0,864	1,157	Bebas Multikolineraitas
SPI	0,848	1,179	Bebas Multikolineraitas
SM	0,978	1,022	Bebas Multikolineraitas

Sumber : Data Primer diolah, 2021

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
KAD	0,567	Bebas Heteroskedastisitas
SPI	-0,060	Bebas Heteroskedastisitas
SM	0,399	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber : Data Primer diolah, 2021

Uji Hipotesis

a. Uji Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi linier berganda dan merupakan penelitian two-tail dengan tingkat signifikansi (α) 5%. Perhitungan model regresi linier berganda dilakukan dengan SPSS 21.0. Analisis ini digunakan menguji adanya pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, sensitivitas moral terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa. Dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Pencegahan fraud Pengelolaan Keuangan Desa

X1 = Kompetensi

X2 = Sistem Pengendalian Intern

X3 = *Sensitivity* Moral

a = Konstanta

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

e = kesalahan.

Uji Regresi Berganda

Variabel	Unstandardized Coeff. Beta	t. hitung	Sig
Konstanta	-40,657	-2,634	0,014
KAD	4.305	5,977	0,000
SPI	-0,454	-1,209	0,235
SM	1,032	3,706	0,001

Sumber : Data Primer diolah, 2021

Dari tabel 4.14 di atas dapat dibuat persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$PF = - 40,657 + 4,305KAD - 0,454SPI + 1,032SM + e$$

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil Uji R

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,800 ^a	0,639	0,606	7,24427

Sumber : Data Primer diolah, 2021

Hasil perhitungan untuk nilai R^2 diperoleh dalam analisis regresi berganda diperoleh nilai koefisien determinasi (Adj R^2) sebesar 0,639. Hal ini berarti bahwa 63,9% variasi variabel pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa dapat dijelaskan oleh variabel kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian intern dan sensitivitas moral sedangkan sisanya sebesar 38,3% dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

C. Uji F

Uji F dalam model ini digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil Uji F didapatkan hasil sebagai berikut :

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2978,547	3	992,849	18,919,000 ^b	
1 Residual	1679,342	32	52,479		
Total	4657,889	35			

d. Uji t

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui hasil uji t seperti dalam tabel di bawah ini:

Hasil Uji t				
Variabel	T hitung	T tabel	Sig	Keterangan
KAD	5,977	1,688	0,000	H1 diterima
SPI	-1,209	1,688	0,235	H2 ditolak
SM	3,706	1,688	0,001	H3 diterima

Sumber : Data Primer diolah, 2021

PEMBAHASAN

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Berdasarkan hasil uji t untuk variabel kompetensi aparatur desa diperoleh nilai t hitung sebesar 5,977 lebih besar dari t tabel sebesar 1,688 dan nilai probabilitas $0,000 < 0,05$, maka H1 diterima, yang berarti bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan dana desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Atmadja & Saputra, 2017), (Wonar et al., 2018), (Njonjie et al., 2019), dan (Romadaniati et al., 2020). Dalam pengelolaan keuangan desa aparatur harus memiliki kompetensi/kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab. Untuk meningkatkan kompetensi aparatur dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan penyuluhan ataupun mengikuti diklat yang direncanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Disamping itu untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam pengelolaan keuangan desa, aparatur juga dapat mengikuti kegiatan workshop, seminar ataupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yang diselenggarakan oleh lembaga – lembaga terkait.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Berdasarkan hasil uji t, variabel pengaruh sistem pengendalian intern terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan dana desa diperoleh nilai t hitung -1,209 dengan signifikansi 0,235. Oleh karena t hitung lebih kecil dari t tabel ($-1,209 < 1,688$) dan nilai probabilitas $0,235 > 0,05$, maka H2 ditolak. Hal tersebut berarti

bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan dana desa. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Atmadja & Saputra, 2017), (Romadaniati et al., 2020) dan (Njonjie et al., 2019) tetapi sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wonar et al., 2018). Ketika berbicara tentang diagnostic control system maka apa yang ingin dicapai oleh atasan dengan menerapkan sistem tersebut adalah melakukan pemantauan dan mengoreksi penyimpangan dari prosedur standar kinerja perusahaan. Dari hasil pengujian survey lapangan bahwa pemerintah desa tidak melakukan penelusuran latar belakang calon pegawai desanya dalam pencarian atau menentukan pegawainya tetapi mereka langsung ditunjuk oleh pimpinan maka hal itu menyebabkan bawahan lebih takut kepada pimpinannya daripada patuh terhadap aturan sekalipun pimpinannya salah atau tidak jujur, Kepala desa kurang melakukan interaksi secara intensif dengan para kepala dusun dan setingkat RT dalam hal yang berhubungan dengan keuangan dan kurang menjalin hubungan yang baik dengan instansi terkait sehubungan dengan program kerja yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Badan Pemberdayaan Kampung, ditemukan bahwa kepala desa atau kepala kampung lebih berperan aktif dalam mengelola uang desa yang sudah diserahkan. Bendahara hanya dijadikan sebagai alat untuk melakukan pencairan uang setelah itu diserahkan kepada kepala desa, sehingga ada penyalahgunaan dana desa dengan adanya temuan laporan fiktif dan keterlambatan penyampaian laporan. Kemungkinan penyebab lainnya SPI tidak berpengaruh adalah belum adanya SPI yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Sarumi masih merujuk kepada SPI yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu PP 60 Tahun 2008 dan dalam penerapan pengendalian intern tanggung jawab pengawasan dilakukan dalam tingkat pimpinan. Dalam pelaksanaan kegiatan pimpinan lebih dominan dalam melakukan pemantauan tanpa memberikan kepercayaan kepada bawahan untuk melakukan inovasi dalam mencapai tujuan pemerintahan. Seperti yang dijelaskan di atas dari empat system control yang ada yaitu belief system, boundary system, diagnostic system dan interactive control system, yang lebih digunakan adalah diagnostic control system dimana pengambilan keputusan ada pada kepemimpinan tanpa memberikan keleluasaan kepada bawahannya.

Pengaruh Sensitivitas Moral Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Berdasarkan tabel hasil uji t, variabel pengaruh sensitivitas moral terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan dana desa diperoleh nilai thitung 3,706 dengan signifikansi 0,001. Oleh karena thitung lebih besar dari t tabel ($3,706 > 1,688$) dan nilai probabilitas $0,001 < 0,05$, maka H_3 diterima. Hal tersebut berarti bahwa sensitivitas moral berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan dana desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Atmadja & Saputra, 2017), (Njonjie et al., 2019) dan (Romadaniati et al., 2020). Moralitas dapat mempengaruhi etika atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Moralitas individu akan berhubungan pada kecenderungan seseorang untuk melakukan kecurangan akuntansi. Individu yang mempunyai tingkat moral yang tinggi akan dapat mencegah terjadinya kecurangan karena individu yang mempunyai moral tinggi akan menaati aturan sesuai dengan prinsip-prinsip etika universal, begitupun sebaliknya, individu yang memiliki moral yang rendah cenderung membuat keputusan berdasarkan hal yang diinginkan oleh dirinya sendiri dan tidak menaati peraturan dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Namun, sistem pengendalian intern tidak memiliki pengaruh signifikan dalam mencegah fraud karena kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pengendalian intern yang efektif di tingkat desa. Selain itu, sensitivitas moral juga memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan fraud, di mana individu

dengan moral yang tinggi lebih mungkin untuk mematuhi aturan dan etika universal dalam pengelolaan keuangan dana desa.

Beberapa saran diberikan untuk penelitian selanjutnya, seperti memperluas wilayah penelitian, menambah variabel penelitian, dan memperbaiki pernyataan dalam kuesioner dan melakukan wawancara yang lebih mendalam. Selain itu, penting untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan, dan membentuk whistleblowing system untuk mendorong masyarakat dan pegawai melaporkan tindakan kecurangan. Selain itu, pemerintah desa perlu mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika dalam pengelolaan dana desa. Namun, penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk semua desa/kampung, sehingga penambahan populasi/sampel dapat meningkatkan akurasi hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Asia Pacific Fraud Journal now has been accredited "SINTA 3 (Rank 3)" by the Ministry of Research and Technology of The Republic of Indonesia (No SK. 85/M/KPT/2020).
- Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2017). Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12(1), 7–16.
- DAMAYANTI, D. N. S. (2016). PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN MORALITAS INDIVIDU TERHADAP KECURANGAN AKUNTANSI (Studi Eksperimen pada Pegawai Bagian Keuangan dan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta). *Auditing: A Journal of Practice & Theory*.
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 61–70. <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4452>
- Jayanti, L. S. I. D., & Suardana, K. A. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas, Whistleblowing dan SPI Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(3), 1117. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i03.p16>
- Nisak, C., Fitri, P., & Kurniawan, A. (2013). Sistem Pengendalian Intern Dalam Pencegahan Fraud Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Pada Kabupaten Bangkalan. *Jaffa*, 01(1), 15–22.
- Njonjie, P., Nangoi, G., & Gamaliel, H. (2019). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal dan Moralitas Aparatur Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 10(2), 79. <https://doi.org/10.35800/jjs.v10i2.24955>
- Romadaniati, Taufik, T., & Nazir, A. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan whistleblowing system terhadap pencegahan fraud pada pemerintah desa dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi. (studi pada desa-desa di kabupaten bengkalis). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 227–237.
- Santi Putri Laksmi, P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 2155. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p18>
- Sukmaningrum, T. (2012). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Semarang. Skripsi.
- Sulistiyo, A. B., Al Ardi, R. D., & Roziq, A. (2020). Implementasi the New Fraud Triangle Model Dengan Perspektif Syariah Dalam Mendeteksi Perilaku Fraud. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(1), 21–46. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i1.4324>
- Wonar, K., Falah, S., & Pangayow, B. J. . (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moral Sensitivity Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset*, 1(November), 63–89. <http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3933>
- Zulfikar, Ahmad. 2017. "Pengaruh Moralitas Aparat, Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi Dan Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Pada Kabupaten Sinjai. Makasar. Skripsi.